



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah Informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada pemerintah pusat yang dipublikasikan melalui media cetak dan / atau media elektronik sesuai dengan ketentuan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Materi RLPPD merupakan Ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2019 yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan yang disusun berdasarkan hasil laporan perangkat daerah sebagai implementasi dari pelaksanaan RKPD Tahun 2019.

II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6°56'49" - 7°45'00" Lintang Selatan dan 107°25'8" - 108°7'30" Bujur Timur, Garut mempunyai jumlah kecamatan sebanyak 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031, Kabupaten Garut memiliki wilayah seluas 3.107,05 km² (310.705 ha). Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu 21.633 ha atau 6,96%, sedangkan Kecamatan Tarogong Kidul merupakan wilayah terkecil dengan luas 2.057 ha atau 0,66% dari wilayah Kabupaten Garut. Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.

2. Angka Kemiskinan

Dari hasil pendataan Susenas tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mengalami penurunan sekitar 6,12 ribu jiwa dari 241,31 ribu jiwa (9,27 %) pada tahun 2018 menjadi sebanyak 235,19 ribu jiwa (8,98 %) pada tahun 2019, atau turun sebesar 0,29%. Selama periode 2014-2019, persentase penduduk miskin menurun 3,49%, dan penurunan tersebut merupakan penurunan tertinggi keempat dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja perekonomian selama periode 2011-2019 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif setelah mengalami kenaikan pada tahun 2016 yang tumbuh 5,90% di atas rata-rata Jawa Barat (5,66%) dan nasional (5,03%), tetapi kemudian kembali mengalami perlambatan pada tahun 2017 sebesar 4,91%, namun pada tahun 2018 LPE kembali meningkat 4,96% dan tahun 2019 LPE mencapai 5,02% menyamai LPE Nasional Sebesar 5,02%, meskipun masih dibawah Jawa Barat sebesar 5,07 %.

4. Pendapatan Perkapita

Pada tahun 2019 pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku mengalami pertumbuhan sebesar 7,96% atau dari semula Rp. 20.338.063,- pada tahun 2018 menjadi Rp. 21.956.452,- pada tahun 2019. Peningkatan ini dapat di katakan cukup tinggi karena levelnya berada di atas laju inflasi sebesar 1,72% yang terjadi sepanjang tahun 2019. Namun demikian, peningkatan tersebut belum sepenuhnya dapat dipakai untuk menggambarkan peningkatan dari daya beli masyarakat. Karena pada PDRB per kapita yang dihitung atas dasar harga berlaku, selain masih terkandung inflasi yang sangat berpengaruh terhadap daya beli, juga karena pola distribusi dari pendapatan regional Garut tidak mutlak merata. PDRB per Kapita adh berlaku tersebut dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat produktifitas penduduk di suatu wilayah yang menunjukkan nilai pendapatan yang dihasilkan akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah Garut per penduduk selama satu tahun.

IV. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2019

RPJMD Kabupaten Garut periode tahun 2014 - 2019 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 - 2025 yaitu tahap yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan keunggulan daerah. Pada Tahap Ketiga ini ditujukan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kontribusi Kabupaten Garut terhadap pencapaian pembangunan baik dalam konteks provinsi maupun nasional. Pada tahapan ini, fokus pembangunan lebih diorientasikan bagaimana mewujudkan Kabupaten Garut keluar dari status sebagai daerah kantong kemiskinan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi tahun 2014 -2019 yaitu :

“ Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

- Bermartabat : Memiliki wibawa, harga diri serta diperhitungkan baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.
- Nyaman : Memiliki suasana yang tenang dan damai, sehingga setiap program pembangunan bisa dilaksanakan dengan optimal dan kondusif

- Sejahtera : Hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, sehingga bisa meningkatkan taraf kehidupan mereka dalam pemenuhan kebutuhannya

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;
3. Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur.

V. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Garut pada Tahun 2019 di targetkan sebesar 4,830 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 4,795 Triliun rupiah atau mencapai 99,26 %, yang bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan 501 miliar rupiah dengan realisasi 486 miliar rupiah dengan presentase realisasi sebesar 97,12 %
2. Dana Perimbangan yang ditargetkan sebesar 2,801 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 2,843 triliun atau mencapai 101,49 %.
3. Lain – lain pendapatan daerah yang sah yang ditargetkan sebesar 1,527 Triliun rupiah dengan realisasi sebesar 1,464 triliun rupiah atau mencapai 95,88 %

Belanja Daerah Kabupaten Garut pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar 5,011 triliun rupiah dengan realisasi belanja sebesar 4,595 triliun rupiah atau mencapai 91,70%, yang dialokasikan untuk:

1. Belanja tidak langsung sebesar 2,612 triliun rupiah dengan realisasi belanja sebesar 2,489 triliun rupiah atau mencapai 95,29 %
2. Belanja Langsung sebesar 2,398 triliun rupiah dengan realisasi belanja sebesar 2,105 triliun rupiah atau mencapai 87,78 %

VI. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019

A. Ringkasan Urusan Wajib

1. Urusan Pendidikan

Pelaksanaan urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, melaksanakan 9 Program dan 146 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 436,179,861,706.00 dan realisasi sebesar Rp. 421,171,228,834.00 atau 96.56 %.

2. Urusan Kesehatan

Pelaksanaan urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dr Slamet, dengan alokasi anggaran,

- a. Dinas Kesehatan melaksanakan 22 program dan 271 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 349,612,168,690.00 dan realisasi sebesar Rp. 296,047,333,952.00 atau sebesar 84.68 %.
- b. Rumah Sakit Umum dr. Slamet Garut melaksanakan 2 program dan 7 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 220,257,426,846.00 dan realisasi Rp. 200,780,426,148.00 atau sebesar 91,16 %.

3. **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dengan 23 Program dan 170 kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 425,307,152,818.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 350,324,260,007.00 atau 82,37 %.
4. **Urusan Perumahan dan Permukiman**
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan permukiman, dengan 7 Program dan 372 Kegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 348,233,810,870.00 dan realisasi sebesar Rp. 345,710,998,760.00 atau 99.28 %.
5. **Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
 - a. **Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Satuan polisi Pamong Praja dengan 7 Prgram dan 28 kegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4,043,973,200.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3,959,318,646.00 atau 97.91%
 - b. **Sub Urusan Bencana Daerah**
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan 10 Program dan 34 kegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 43,828,957,214.00 serta realisasi anggaran sebesar Rp. 13,977,257,272.00 atau 31.89%
 - c. **Sub Urusan Kebakaran**
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran, dengan 6 Program dan 24 Kegiatan dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 9,029,609,000.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8,786,415,273.00 atau 97,31 %
6. **Urusan Sosial**
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, dengan 10 Program dan 40 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 12,073,993,000.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10,890,439,415.00 atau 90,20 %
7. **Urusan Tenaga Kerja**
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan 7 Program dan 39 kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5,419,051,494.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 5,286,376,444.00 atau 97,55 %
8. **Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan 8 Program dan 39 kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2,360,000,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 2,347,416,240.00 atau 99,47%
9. **Urusan Pangan**
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, dengan 5 Program dan 33 kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3,241,665,000.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3,214,402,525.00 atau 99,16 %.

10. Urusan Pertanahan
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, dengan 1 Program dan 4 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 509,617,400.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 353,602,920.00 atau 69,39 %.
11. Urusan Lingkungan Hidup
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dengan 15 Program dan 72 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 45,342,637,100.00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 44,579,703,902.00 atau 98,32 %.
12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan 5 Program dan 35 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 12,196,171,844.00 dan realisasi sebesar Rp. 11,910,112,129.00 atau 97.65 %.
13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan 8 Program dan 54 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 8,079,595,470.00 dan realisasi sebesar Rp. 7,782,482,907.00 atau 96.32 %
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian penduduk, keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan 7 Program dan 27 kegiatan alokasi anggaran belanja langsung sebesar RP. 21,308,015,726.00 dan realisasi sebesar Rp. 21,030,000,503.00 atau 98.70 %
15. Urusan Perhubungan
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, dengan 8 Program dan 41 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 11,001,079,620.00 dan realisasi sebesar Rp. 10,043,564,763.00 atau 91.30 %
16. Urusan Komunikasi dan Informatika
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan 8 Program dan 41 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 14,807,177,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 14,418,430,559.00 atau 97.37 %
17. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM, dengan 8 Program dan 38 kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 8,040,173,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 6,546,028,926.00, atau 81.42 %
18. Urusan Penanaman Modal
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu, dengan 7 Program dan 33 kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3,297,531,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 2,969,450,411.00 atau 90.05 %.
19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan 9 Program dan 65 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 26,789,937,750.00 dan realisasi sebesar Rp. 24,963,281,355.00 atau 93.18 %

20. Urusan Statistik
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan 1 program dan 1 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 157,553,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 147,388,000.00 atau 93.55 %
 21. Urusan Persandian
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan 1 Program dan 1 Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100,000,000 dan realisasi Rp. 100,000,000 atau 100 %
 22. Urusan Kebudayaan
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan, dengan 6 Program dan 31 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5,436,600,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 2,423,322,100.00 atau 44.57 %
 23. Urusan Perpustakaan
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan 6 Program dan 33 kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 11,831,510,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 9,307,679,706.00 atau 78.67 %
 24. Urusan kearsipan
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan 4 Program dan 7 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 385,000,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 374,449,000.00 atau 97.26%
- B. Ringkasan Urusan Pilihan
1. Urusan Kelautan dan Perikanan
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan, dengan 13 Program dan 44 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 4,387,006,500.00 dan realisasi sebesar Rp. 4,279,025,616.00 atau 97.54 %
 2. Urusan Pariwisata
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan, dengan 3 Program dan 13 kegiatan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 49,495,554,140.00 dan realisasi sebesar Rp. 12,715,864,556.00 ,atau 25.69 %.
 3. Urusan Pertanian
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Pertanian, dengan 13 Program dan 72 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 35,845,506,929.00 dan realisasi sebesar Rp. 32,843,205,932.00 atau 91,62 %
 4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM, dengan 1 Program dan 3 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 137,570,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 136,170,000.00 atau 98.98 %
 5. Urusan Perdagangan
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Pergangan dan ESDM, dengan 4 Program dan 26 Kegiatan , dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 48,464,785,750.00 dan realisasi sebesar Rp. 13,524,941,680.00 atau 27.91 %

6. **Urusan Perindustrian**
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Per, dengan 9 Program dan 47 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7,188,244,640.00 dan realisasi sebesar Rp. 6,886,457,966.00 atau 95.80 %
 7. **Urusan Transmigrasi**
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi, dengan 2 Program dan 2 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 84,345,100.00 dan realisasi sebesar Rp. 82,579,575.00 atau 97.91 %
- C. Ringkasan Penunjang Urusan pemerintah Daerah**
1. **Pembinaan dan Pengawasan**
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Inspektorat, dengan 7 Program dan 36 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 7.530.870.750 dan realisasi sebesar Rp. 6,150,184,469 atau 81,67 %
 2. **Perencanaan**
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan 15 Program dan 68 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 12,632,181,544.00 dan realisasi sebesar Rp. 11,842,576,572.00 atau 93,75 %
 3. **Keuangan**
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah,
 - a. Badan Pengelolaan keuangan Daerah, dengan 7 Program dan 46 Kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp. 46,830,290,468.00 dan realisasi Rp. 46,086,182,952.00 atau 98.41 %
 - b. Badan Pendapatan Daerah, dengan 6 Program dan 50 Kegiatan, dengan alokasi anggaran Rp. 5,927,029,720.00 dan realisasi Rp. 5,798,612,704.00 atau 97.83 %
 4. **Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan**
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat, dengan 8 Program dan 47 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 13,775,470,370.00 dan realisasi sebesar Rp. 12,966,111,852.00 atau 94.12 %
 5. **Penelitian dan Pembangunan**
Pelaksanaan urusan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan 2 program dan 5 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 775,000,000.00 dan realisasi sebesar Rp. 615,745,429.00 atau 79.45 %
 6. **Penunjang lainnya**
 - a. Sekretariat Daerah, dengan 22 Program dan 92 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31,700,787,100.00 dan realisasi sebesar Rp. 30,467,663,475.00 atau 96,11 %
 - b. Sekretariat DPRD, dengan 7 Program dan 31 Kegiatan, dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 24,224,500,435.00 dan realisasi sebesar Rp. 22,559,055,608.00 atau 93,12 %
- D. Ringkasan Urusan Pemerintahan Umum**
Urusan Penunjang pemerintahan Umum dilaksanakan Oleh Badan kesatuan Bangsa dan Politik, dengan 9 Program dan 35 Kegiatan, dengan anggaran Rp. 6,492,542,450.00 dengan realisasi sebesar Rp. 6,218,157,450.00 atau 95,77 %.

VII. Tugas Pembantuan

Pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Garut mendapatkan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian dengan anggaran Rp. 9.971.761.000,00. dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di daerah berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 SP DIPA- 018.04.4.029053/2019, tanggal 5 Desember 2018 dari unit organisasi Ditjen Hortikultura kepada Satuan Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Garut, untuk Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, dengan kegiatan meliputi :

- 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat sebesar Rp. 7.969.261.000,00;
- 2) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura sebesar Rp. 770.000.000,00;
- 3) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura sebesar Rp. 105.000.000,00;
- 4) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura sebesar Rp. 667.500.000,00;
- 5) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura sebesar Rp. 460.000.000,00.

Berdasarkan petunjuk umum program peningkatan produksi dan nilai tambah produksi hortikultura yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, bahwa Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura merupakan pelaksanaan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Adapun sasaran strategis pengembangan hortikultura tahun 2019 adalah "Stabilnya Produksi Cabai dan Bawang" dan "Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing".

Strategi yang dikembangkan untuk mencapai sasaran strategis Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2019 diantaranya meliputi Pengembangan kawasan hortikultura, Penguatan Sistem Perbenihan Hortikultura, Penguatan Sistem Perlindungan Hortikultura, dan Penguatan Sistem Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

VIII. Penghargaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Garut dalam tahun 2019

Bidang Kesehatan

1. Penghargaan Kabupaten Sehat Swati Saba Wistara Tingkat Nasional dari Kementerian Dalam Negeri;
2. Juara II Nakes Teladan Tingkat Provinsi nama penerima Aan Sutisna Petugas Promkes UPT Cisewu dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
3. Juara I Olimpiade Saka Bakti Husada (SBH) dari Provinsi Jawa Barat;
4. Juara I Gema Cermat Tingkat Provinsi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
5. Inovasi Top N3 Kompetensi Inovasi Jawa Barat Tahun 2019 dari Gubernur Jawa Barat kepada UPT Puskesmas Cihurip;
6. Juara II FKTP Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Kategori Puskesmas Kawasan Terpencil Solusi Lokal Masalah Akses dan Mutu Layanan KIA dari Gubernur Jawa Barat kepada UPT Puskesmas Cihurip;
7. Juara I Evaluasi Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut dari Pemerintah Kabupaten Garut kepada UPT Puskesmas Cihurip;
8. Juara I Tingkat Kodim pada Kegiatan Bakti TNI KB Kesehatan Terpadu Kodam III/Siliwangi kepada UPT Puskesmas Cihurip.

Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana

1. Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2019 Kategori Pratama (Tingkat Nasional);
2. Raihan Gelar Sekolah Ramah Anak Terbaik Tingkat Sekolah Luar Biasa untuk SLBN B Garut;
3. Peserta 10 Besar Pagelaran Aneka Seni Pertunjukan Tingkat Provinsi Jawa Barat Pada Lomba Kreativitas Anak dalam Pemanfaatan Waktu Luang Tahun 2019;
4. Juara Ketiga Jambore Ajang Kreativitas Generasi Berencana tingkat Provinsi Jawa Barat.

Bidang Pemerintahan

1. Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Propinsi Jawa Barat Tahun 2019, sebagai Kabupaten dengan Perencanaan dan Pencapaian Terbaik Kedua;
2. Penilaian SAKIP BB pada tahun 2019;
3. Predikat penilaian LPPD Kabupaten Garut tahun 2018 yang dilakukan penilaiannya Tahun 2019, mendapatkan predikat sangat tinggi dan hasil tersebut menempatkan Kabupaten Garut sebagai urutan ke 1 di Tk. Provinsi Jawa Barat.

Bidang Lingkungan Hidup

1. Penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada SMPN II Cikajang sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional 2019.

Bidang Investasi

1. Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Sangat Baik (A-) Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Bidang Tenaga Kerja

1. Pekerja Juara/Teladan Sektor Padat Karya Tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 an. Ismail Jauhari dari PT. Changshin Reksa Jaya Kabupaten Garut.
2. Piagam Penghargaan 10 Mediator Terbaik Dalam Penganugerahan Mediator Hubungan Industrial Juara Provinsi Jawa Barat an. Asep Yudi Tahajudin, SH, MH.

Bidang Pendidikan Dan Olah Raga

1. Juara 3 Tingkat Provinsi O2SN atas nama Muhammad Abdul Yajid Kategori Lomba Senam Putra asal Sekolah SDN 2 Pataruman;
2. Juara 3 Tingkat Provinsi O2SN atas nama Rusli Muhamad Ropi Kategori Silat Putra asal Sekolah SDN 1 Padamukti;
3. Juara 3 Tingkat Provinsi O2SN atas nama Sherrin Khoirunnisa Kategori Silat Putri asal Sekolah SDN 2 Cikajang;
4. Juara 3 Tingkat Provinsi O2SN atas nama Hafiz faiq Arrazak Kategori Renang Putra asal Sekolah SDN 3 Pakuwon;
5. Juara 1 Tingkat Nasional (FL2N) atas nama Elmira Khaerunnisa Kategori Cipta Syair asal Sekolah SDN 2 Desa Kolot;
6. Juara 3 Tingkat Nasional (FL2N) atas nama Dhea Nita Marsya Kategori Mendongeng asal Sekolah SDN 3 Karangpawitan;
7. Finalis Tingkat Nasional (FL2N) atas nama Putri Vinata Kategori Cipta Syair asal Sekolah SDN 3 Ngamplang;
8. Finalis Tingkat Nasional (FL2N) atas nama Adhnan Abdussamii Kategori Mendongeng asal Sekolah SDIT ASSALAM;
9. Juara 1 Harapan Tingkat Nasional (FL2N) atas nama Siti Muta'ali Kategori MTQ Putri asal Sekolah SDN 1 Pasirwangi;

10. Finalis atas nama Muammar Ahmad Kategori MTQ Putra asal Sekolah SDN 3 Samarang;
11. Juara 1 Harapan Tingkat Provinsi (FLS2N) atas nama Nazhila Nurul Hayyinun Kategori Duet Gitar asal Sekolah SMPN 4 Garut;
12. Juara 1 Harapan Tingkat Provinsi (FLS2N) atas nama Mahin Abdul Mu'min Kategori Duet Gitar asal Sekolah SMPN 4 Garut;
13. Juara 1 Harapan Tingkat Provinsi (FLS2N) atas nama Britney Kimberly Kategori Menyanyi Solo asal Sekolah SMPN 2 Garut.

Bidang Pertanian, Perikanan Dan Peternakan

1. Penghargaan Kopi Organik dari Gubernur Jawa Barat kepada Kelompok Tani Berkah Tani Desa Pangauban Kecamatan Cisurupan.
2. Penghargaan Teh Organik dari Gubernur Jawa Barat kepada Kelompok Tani Giri Tani Desa Sukatani Kecamatan Singajaya.
3. Juara 1 Lomba Inseminator Berprestasi Tingkat Jabar kategori Petugas IB Sapi Potong (an. Heri Heryana, S.Pt SPIB Cikajang);
4. Juara Kontes Ternak Tingkat Jawa Barat:
 - a. Juara 3 kategori Sapi Potong Pasundan jantan (an. Aang Irawan, Ds. Sancang Kec. Cibalong);
 - b. Juara 3 kategori Sapi Potong Pasundan betina (an. Abdal Saputra, Ds. Sancang Kec. Cibalong);
 - c. Juara 3 Kategori Sapi Perah umur 9–12 bulan (an. Winarni, Ds.Padasuka Kec.Cikajang);
 - d. Juara 2 Kategori Sapi Perah Laktasi 2 (an. Rudi, Ds.Mekarjaya Kec.Cikajang).

Bidang Pariwisata Dan Kebudayaan

1. Bidang Kepariwisata:
 - a. Juara Ke II Tingkat Nasional Desa Wisata Maju (Desa Sukalaksana);
 - b. Juara Nominasi 10 Besar Tingkat Nasional Desa Wisata Berkembang (Desa Sukaratu).
2. Bidang Kebudayaan:
 - a. Juara 1 Putra oleh Taufik Mukhariman di Acara Umum Pasanggiri TEMBANG Sunda Cianjuran XXII
 - b. Juara 2 Cabang Qasidah (Bintang Vokalis POP Religi Kategori Anak-anak putri) oleh Nisvia Jannatul Mugni di Acara Festival Seni dan Qasidah (FSQ) Tingkat Provinsi Jawa Barat
 - c. Pinunjul ka 1 (Juara 1) Pria oleh M. Raihan Ilham di Acara Pasanggiri Juru Kawih Sa Jawa Barat
 - d. Juara 1 oleh Hani Maryati di Acara FLS2N Tingkat Nasional Lomba Baca Puisi
 - e. Juara 1 oleh Canda Shakila di Acara Festival Monolog PMBS UNPAD Tk. Jawa Barat
 - f. Juara 1 oleh SMAN 1 Garut di Acara Lomba Musikalisasi Puisi antar Siswa SLTA Tk. Jawa Barat
 - g. Juara 1 oleh Elga Lamiri di Acara Pasanggiri Pupuh Jajaka Tingkat Jawa Barat 2019
 - h. Juara 1 oleh Jodi Sutejo,S.Pd di Acara Lomba Cipta Lagu Mars SMPI Tingkat Jawa Barat 2019
 - i. Juara 1 oleh M. Sururri Purwawinata di Acara Lomba Baca Puisi antar Guru Tingkat Jawa Barat 2019
 - j. Juara 1 oleh M. Raihan Ilham di Acara FLS2N Tingkat Jawa Barat Lomba Nyanyi Solo
 - k. Juara 2 oleh Kesya Arla Kusnadi di acara FLS2N Tingkat Nasional Lomba Nyanyi Solo
 - l. Juara 2 oleh Syahrul Bentar Sugriwa J di Acara Lomba Monolog Artefac Yogyakarta Tk. Nasional
 - m. Juara 3 oleh Syahrul Bentar Sugriwa di Acara Lomba Monolog Artefac Yogyakarta Tk. Nasional

- n. Juara 3 oleh Teater Awal di Acara Festival Teater Remaja Nusantara Tk. Nasional
- o. Juara 3 oleh Muhamad Iqbal Indra Prasatria di acara FLS2N Tingkat Nasional Lomba Desain Foster 2019
- p. Juara 1 Pop Religi Dewasa oleh Ai Nurhasanah, S.Pd.i. di acara Festival Seni Islami Tingkat Jawa Barat
- q. Juara Umum 1 oleh Paguron Sinar Pusaka Putra di acara Kejuaraan Pencak Silat se Priangan
- r. Juara Umum 2 oleh Paguron Sinar Pusaka Putra Raksa Jagat di acara Festival Pencak Silat GPK Cup se Jawa Barat 2019
- s. Juara 3 oleh Cecep Haikal Muhammad di acara Lomba Penulisan Puisi Tingkat Nasional 2019.

Bidang Kesehatan pada Rumah Sakit Umum

1. Piagam Penghargaan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori cukup Tahun 2019

IX. Penutup

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 ini, pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan guna mempercepat pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Garut tahun 2014 - 2019, yaitu "**Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bermartabat, Nyaman dan Sejahtera**". Upaya itu dilakukan dengan mengarahkan seoptimal mungkin berbagai sumber daya daerah agar dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Disadari sepenuhnya bahwa karena keterbatasan yang dimiliki masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, akan tetapi dalam menghadapi permasalahan, keterbatasan dan tantangan, Pemerintah Kabupaten Garut telah berusaha secara optimal melaksanakan tugas yang diamanatkan.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 ini disampaikan, semoga dapat dijadikan bahan informasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, sekaligus dapat dijadikan bahan evaluasi dan motivasi dalam penyempurnaan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun yang akan datang.

Garut, 15 April 2020



BUPATI GARUT,

H. RUDY GUNAWAN, SH.,MH.,MP.